

Evaluasi Perencanaan Dan Pengadaan Obat Di Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara

Dian K. Ta'au^{1*}, Douglas N. Pareta¹, Jabes W. Kanter¹, Silvana L. Tumbel²

¹Program Studi Farmasi, Fakultas FMIPA, Universitas Kristen Indonesia Tomohon

²Program Studi Biologi, Fakultas MIPA, Universitas Kristen Indonesia Tomohon

Penulis korespondensi * : diankristinat@gmail.com

Diterima tanggal : 24 Juni 2020; Disetujui tanggal : 30 Juli 2020

ABSTRAK

Pengelolaan obat merupakan rangkaian kegiatan yang menyangkut aspek perencanaan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pencatatan dan pelaporan. Perencanaan dan pengadaan obat yang tidak baik dapat mengakibatkan ketersediaan obat tidak dapat dipenuhi sehingga membuat pelayanan kesehatan tidak berjalan dengan baik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi sistem perencanaan dan pengadaan obat di Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pengambilan data secara retrospektif. Hasil penelitian diperoleh data alokasi pengadaan obat 96,49%, ketersediaan obat sesuai kebutuhan 100%, kesesuaian obat yang tersedia dengan DOEN 84,33%, ketepatan perencanaan 150% dan kesesuaian permintaan obat 69,57%. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa hasil evaluasi sistem perencanaan dan pengadaan Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang belum sesuai standar Kemenkes RI yaitu Alokasi Dana Pengadaan Obat, Kesesuaian Item Obat Yang Tersedia Dengan DOEN, Kesesuaian Permintaan, dan yang sesuai dengan standar Kemenkes RI yaitu Ketersediaan Obat Sesuai Kebutuhan dan Ketepatan Perencanaan Obat.

Kata kunci: Pengelolaan obat, Perencanaan, Pengadaan.

ABSTRACT

Drug management is a series of activities involving aspects of planning, procurement, storage, distribution, recording and reporting. Improper planning and procurement of drugs resulted supplied of drugs couldn't be fulfilled. so the service is not carried out properly. The purpose of this study was evaluate the system of planning and procurement of drugs in the Pharmacy Installation of the North Sulawesi Provincial Health Office. The method used in this research is descriptive qualitative with retrospective data collection. The research obtained 96.49 % medical procurement, drug allocation data, availability of drugs according to the needs of 100%, the suitability of available drugs with 8433% DOEN, 150% accurate planning and 69. 57% packet suitability of drug demand. From these data it can be concluded that the results of the evaluation of the planning and procurement system of the Pharmacy of the North Sulawesi Provincial Health Office that are not yet in accordance with the standards of the Ministry of Health Republic of Indonesia, namely the Allocation of Drug Procurement Funds, Suitability of Drug Items with Available DOEN, and According to the Ministry of Medicine, in accordance with Indonesia. the Needs and Accuracy of Drug Planning.

Keywords: Drug management, Planning, Procurement.

PENDAHULUAN

Pelayanan Kesehatan merupakan hak setiap orang yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang harus diwujudkan dengan upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang steinggi-tingginya. Pelayanan Kefarmasian merupakan bagian integral dari sstem pelayanan kesehatan [1].

Pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai merupakan standar pelayanan farmasi yang meliputi: perencanaan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pencatatan dan pelaporan [2-4]. Salah satu sarana pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai pemerintah adalah Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Pada observasi awal penulis, Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara menghadapi permasalahan pada tahap perencanaan dan pengadaan obat yaitu ketidak sesuaian antara rencana kebutuhan obat dengan realisasi pengadaan obat, terbatasnya anggaran pengadaan obat dan kemampuan penyedia obat/distributor menyediakan obat. Hasil penelitian Putranti (2016) terdapat beberapa obat yang tidak dibutuhkan tetapi tersedia di Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Kota Surakarta serta belum mengutamakan pengadaan obat yang mengacu pada DOEN (Daftar Obat Essensial Nasional).[5]

Pentingnya pengelolaan perencanaan dan pengadaan obat di instalasi farmasi dalam mencapai kesehatan yang optimal maka perlu dilakukan evaluasi terhadap perencanaan dan pengadaan obat. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengevaluasi perencanaan dan pengadaan obat di Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

METODE PENELITIAN

Tempat Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara pada bulan Januari 2020.

Alat Dan Bahan

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah Smartphone, laptop, printer dan alat tulis menulis.

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar panduan wawancara dalam bentuk pertanyaan dan lembar kerja.

Jenis Dan Rancangan Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan mengevaluasi sistem perencanaan dan pengadaan obat di Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, berdasarkan lembar pertanyaan/wawancara dan data sekunder. Data sekunder dikumpulkan secara retrospektif di Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Data sekunder diperoleh dengan penelusuran dokumen-dokumen tahun 2018. Data yang diperoleh tersebut kemudian dianalisis dengan pedoman indikator standar menurut Direktorat Jendral Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan RI.

Prosedur Pelaksanaan Penelitian

1. Peneliti mengajukan surat izin permohonan untuk melaksanakan penelitian di Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
2. Pengambilan data dilakukan dengan cara observasi langsung di Instalasi Farmasi Daerah Provinsi Sulawesi Utara dengan melakukan pengecekan langsung melalui lembar paduan wawancara dan lembar kerja.
3. Penyusunan laporan penelitian
4. Menarik kesimpulan dan saran

Variabel Yang Diamati

Variabel yang diamati adalah indikator perencanaan dan pengadaan obat yang meliputi alokasi dana pengadaan obat, ketersediaan obat sesuai kebutuhan, ketersediaan obat yang tersedia dengan DOEN, ketepatan perencanaan dan kesesuaian permintaan obat.

Analisis Data

Data diperoleh dari hasil penelitian meliputi pengumpulan dan pengolahan data obat menurut indikator dengan bentuk lembar kerja dan wawancara mendalam dengan bentuk paduan wawancara tanya jawab, akan dianalisa dari perencanaan dan pengadaan obat di Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara dengan standar yang ditetapkan menurut Kementerian Kesehatan RI.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perencanaan Obat

Perencanaan Obat di Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara dilaksanakan oleh Tim Perencanaan Obat Terpadu, yang bertanggung jawab di dalamnya Kepala Bidang SDK Farmalkes, Kepala Seksi Farmasi dan Pelaksana/ Staf Farmasi. Tahap perencanaan dilaksanakan mulai dari triwulan pertama setiap tahunnya dengan menggunakan metode konsumsi.

Pengadaan Obat

Pengadaan obat di Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara dilaksanakan melalui *E-purchasing* berdasarkan Katalog Elektronik (*E-Catalog*). Pengadaan obat dilaksanakan satu kali dalam setahun. Pejabat Pengadaan membuat paket pembelian obat dalam aplikasi *E-purchasing* berdasarkan daftar pengadaan obat.

Alokasi Dana Pengadaan Obat

Tabel 1 Alokasi Dana Pengadaan Obat

Total Dana Pengadaan Obat (Rp)	Total Kebutuhan Dana Pengadaan Obat (Rp)	Persentase
1.661.468.713	1.721.830.794	96.49%

Dana pengadaan obat dari dana APBD yang disediakan pemerintah adalah sebesar 96.49% dari total kebutuhan dana ditunjukkan dalam tabel 1 belum ideal dimana standarnya harus 100%.

Hal tersebut dikarenakan ada beberapa item obat antara lain: Ibuprofen, Asam Mefenamat tidak masuk dikarenakan kekosongan bahan baku. Selain itu pada saat penyusunan Rencana Kebutuhan Obat (RKO) harga yang digunakan untuk tiap item obat merupakan harga perkiraan sementara karena belum terdapat harga pasti dari

tiap item obat. Pada saat realisasi anggaran dimana terjadi perubahan harga item obat sesuai *e-Catalogue*, Instalasi Farmasi harus melakukan perhitungan kebutuhan ulang untuk disesuaikan dengan anggaran yang akan diterima.

Ketersediaan Obat Sesuai Kebutuhan

Tabel 2 Ketersediaan obat sesuai kebutuhan

Jumlah item obat yang Tersedia	Jumlah item obat yang Dibutuhkan	Persentase
83	83	100 %

Nilai ketersediaan obat sesuai kebutuhan di Instalasi Farmasi Provinsi Sulawesi Utara dapat dilihat pada Tabel 2, menunjukkan hasil sebesar 100 %. Hasil tersebut menunjukkan bahwa ketersediaan obat sesuai kebutuhan sudah memenuhi standar yaitu minimal sebesar 90% [2]. Semua obat-obat yang terdapat di Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara merupakan obat-obat yang dibutuhkan dan dipakai.

Kesesuaian Item Obat Yang Tersedia Dengan DOEN (Daftar Obat Essensial Nasional)

Tabel 3 Kesesuaian item obat yang tersedia dengan DOEN

Jumlah jenis obat yang termasuk dalam DOEN	Jumlah jenis obat yang tersedia	Persentase
70	83	84,33 %

Nilai kesesuaian item obat yang tersedia dengan DOEN di Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel 3 menunjukkan rata-rata sebesar 84,33 %. Hal tersebut berarti Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara belum efisien dalam pemakaian obat yang termasuk dalam DOEN. Idealnya menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia indikatornya adalah 100%.

Obat yang tidak termasuk dalam DOEN sebesar 16,67% adalah obat-obat yang di usulkan oleh puskesmas berdasarkan tingkat kepentingan atau *urgensi* dan pola penyakit serta obat pelayanan kesehatan dasar. Selain menggunakan pedoman Daftar Obat Essensial Nasional (DOEN) Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Daerah juga menggunakan pedoman Formularium Nasional (Fornas). Oleh karena itu, Obat-obat yang disimpan dalam Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara belum semua obat esensial, tetapi terdapat juga obat non esensial yang termasuk dalam daftar Formularium Nasional yang berisi daftar obat-obat dalam pelayanan kesehatan dasar. Ketersediaan obat-obat tersebut karena adanya usulan dari Puskesmas dengan pertimbangan tingkat urgensi dan kebutuhan obat dalam pelayanan kesehatan dasar.

Ketepatan Perencanaan

Tabel 4 Ketepatan perencanaan

Persediaan	Jumlah Perencanaan	Jumlah Pemakaian	Persentase
	(biji)	(biji)	
5,904,376	7,882,577	5,249,211	150 %

Hasil perhitungan indikator ketepatan perencanaan obat berdasarkan perbandingan jumlah obat yang direncanakan dengan jumlah obat yang dipakai di Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara dalam tabel 4 sebesar 150%. Nilai standar untuk indikator ini adalah 100% - 150% [2]. Bila dibandingkan dengan nilai standar Indikator ketepatan perencanaan obat Instalasi Farmasi

Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara sudah memenuhi standar.

Kesesuaian Permintaan Obat

Tabel 5 Kesesuaian permintaan obat

Jumlah item obat	Jumlah jenis obat yang termasuk dipenuhi	Jumlah jenis obat yang diminta	Persentase
83	64	92	69.57 %

Hasil perhitungan indikator kesesuaian permintaan obat di Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara sebesar 69.57%. Itu berarti bahwa jumlah obat yang diminta/direncanakan tidak terpenuhi semua. Ada 28 item obat yang diminta dalam RKO namun tidak terpenuhi.

Obat yang tidak terpenuhi tersebut sebagian merupakan obat dengan jenis yang sama namun berbeda isi dan dosisnya seperti Allupurinol 300mg dan Eritromicin 250mg. Beberapa item obat yang diadakan juga tidak dapat dipenuhi karena terjadi kekosongan bahan baku seperti: Asam Mefenamat, yang menyebabkan kekosongan obat di *distributor*. Pada proses pengadaan obat melalui *e-purchasing*, penyedia/distributor tidak dapat dipilih atau diseleksi karena dalam *e-purchasing* berdasarkan e-katalog penentuan penyedia/distributornya telah diatur sesuai dengan pemenang.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan terhadap sistem perencanaan dan pengadaan di Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan indikator Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dapat disimpulkan bahwa sistem perencanaan dan pengadaan obat di Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang belum sesuai standar Kemenkes RI, Alokasi Dana Pengadaan Obat 96.49%, Kesesuaian Item Obat Yang Tersedia Dengan DOEN 84,33%, Kesesuaian Permintaan 69,57% dan yang sesuai

standar Kemenkes RI, Ketersediaan Obat Sesuai Kebutuhan 100% dan Ketepatan Perencanaan Obat 150%.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Anonim, Peraturan Republik Indonesia No.12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.
- [2] Materi Pelatihan Manajemen Kefarmasian Di Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota, Direktorat Jendral Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan RI, Jakarta, 2010.
- [3] Pondaag, I. G., Sambou, C. N., Kanter, J. W., & Untu, S. D. (2020). Evaluasi Sistem Penyimpanan Obat Di UPTD Instalasi Farmasi Kota Manado. *Biofarmasetikal Tropis*, 3(1), 54-61.
- [4] Rumengan, T. O., Mongi, J., Potalangi, N. O., & Karundeng, E. Z. (2019). Analisis Pelayanan Kefarmasian Di Puskesmas Desa Langsot Kecamatan Tareran I Kabupaten Minahasa Selatan. *Biofarmasetikal Tropis*, 2(2), 90-95.
- [5] Putranti, Sari. 2016. Evaluasi Pengelolaan Obat Pada Tahap Perencanaan Dan Pengadaan Di Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Kota Surakarta. Surakarta.